

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKHIR SEBAGAI
PENGGUNA HEWAN POTONG DI KABUPATEN SUMEDANG
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN JO PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NO. 29 TAHUN 2003 TENTANG
PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, BAHAN ASAL
HEWAN DAN PENYEDIAAN PASAR HEWAN
ABSTRAK**

Kebutuhan akan pangan bagi masyarakat Indonesia merupakan hal utama dari Sembilan kebutuhan pokok, salah satunya kebutuhan pangan hasil dari peternakan. Berkaitan dengan standar dari produk daging yang dikonsumsi oleh konsumen, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar hak-hak dari konsumen terlindungi dan ada batasan usaha bagi pelaku usaha. Dalam kenyataannya, konsumen seringkali dirugikan oleh pelaku usaha dengan menjual produk yang belum memenuhi standar kualitas yg ditinjau oleh Peraturan Perundang-undangan. Di Kabupaten Sumedang contohnya, telah di buat Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Penyediaan Pasar hewan dengan bertujuan untuk meminimalisasi produk yang kurang baik dari hewan potong ini.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan lebih mengacu pada bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Rumanisia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plan*), dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu, untuk melengkapi penelitian, penulis melakukan studi lapangan terhadap berbagai narasumber, yaitu: pelaku usaha, rumah potong hewan, pelaku usaha, masyarakat dan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK). Data-data yang digunakan dianalisis dengan cara analisis kualitatif dan dengan pola pikir logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan belum memenuhi kualifikasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen akhir sehingga diperlukan adanya revisi atas peraturan daerah tersebut dan Pemerintah kab. Sumedang melakukan berbagai perlindungan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha maupun konsumen agar Peraturan daerah tersebut berjalan dengan baik dalam melindungi hak-hak konsumen.

Kata-kata kunci: Perlindungan hukum, Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Penyediaan Pasar Hewan

**LEGAL PROTECTION FOR FINAL CONSUMERS AS THE CONSUMERS
OF CUTTING MEAT IN SUMEDANG REGENCY AS SEEN FROM LAW
NO. 08 YEAR 1999 RELATES TO PROTECTION OF CONSUMERS
JOLOCAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY NO. 29 YEAR 2003
RELATES TO ANIMAL'S HEALTH INSPECTION SERVICE, ORIGIN
MATERIAL OF MEAT AND PROVISION OF ANIMAL MARKET**

ABSTRACT

Need of food for Indonesian people is one of the important needs of nine staples; one of them is the produce of livestock. Regarding to the standard of the meat products that being consumed, government published law No. 8 Year 1999 relates to the protection of consumers, in aim to protect the right of consumers and the limit for the people who run the business. However, some people who sell meat to the consumers frequently cause harms to the consumers by selling meats that do not fulfill the criteria's of the laws. In the region of Sumedang is one of the example, there is a law for Sumedang region No. 29 Year 2003 relates to animal health inspection service, the basic material of the animal, and the provision of markets that sell animal in order to minimize products of certain animals.

This thesis is using normative juridical method which focused on reviewing the application of the rules or norms of the positive laws. This using the approach to laws and conceptual approach which is more focus on laws of primary laws, Law No.08 year 1999, Protection of Consumers, Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 13 / Permentan / OT.140 / 1/2010 About Requirements Rumanisia Slaughterhouse and Meat Handling Unit(Meat Cutting Plan), and Sumedang District Regulation No. 29 Year 2003 relates to Animal Health Inspection Service, Origin Materials of Animals and Provision of Animal Market), secondary and tertiary laws materials. In additional, to complete the research, the researcher did field study to interviewees; business people, slaughterhouse, the inhabitants and Consumer Dispute Settlement Body (BPSK). The data used were analyzed by means of qualitative analysis and the mindset of deductive logic, which was to draw conclusions from individual cases into real general conclusions.

Sumedang District Regulation No. 29 Year 2003 relates to Animal Health Inspection Service, Materials Provision of Animal Origin and Animal Market is not yet fulfill the qualifications to give protection for the consumers, hence it is expected that the regulations in the region of Sumedang as well as the people in charge to do a revision on the Regulation and the administration of Sumedang implements protection, control and elucidation towards people who run the business as well as consumers in order to make the local regulation to run effectively in aim to protect the rights of consumers.

Keywords: *Legal protection , Animal Health Inspection Service , Provision of Animal Market*

DAFTAR ISI

Halaman

Pernyataan Keaslian	i
Pengesahan Revisi	ii
Pengesahaan Pembimbing	iii
Persetujuan Panitia Sidang.....	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vi
Daftar isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka pemikiran	9
F. Metode penelitian	12
1. Sifat Penelitian	13
2. Pendekatan penelitian.....	14

3. Jenis Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II PENGERTIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEDUDUKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen.....	21
1. Sejarah Gerakan Perlindungan Konsumen	21
2. Sejarah Perlindungan Konsumen Di Indonesia	24
B. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	30
C. Subjek Hukum Perlindungan Konsumen Serta Hak Dan Kewajibannya.	33
1. Pelaku Usaha	33
2. Konsumen	35
D. Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen	38
1. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	39
2. Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen	40

BAB III PERANAN PEMERINTAH DAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGUNAKAN HASIL DARI HEWAN POTONG DI KABUPATEN SUMEDANG

A. Tinjauan Yuridis Pengertian Hewan Potong dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	43
1. Pengertian Hewan dan Hewan Potong Secara Umum	43
2. Pengaturan mengenai Pertanggungjawaban Produsen dalam Penjualan Hewan Potong dalam Peraturan Perundang-undangan.....	46
B. Proses Hewan Sebelum Dijual, Dipasarkan, atau Diedarkan	56
1. Tempat Budidaya	57
2. Tempat Produksi Pangan Asal Hewan	58
3. Rumah Potong Hewan	58
C. Pemasaran dan Distribusi Hewan Potong di Indonesia	61
1. Penjualan Daging di Pasar	62
2. Penjualan Daging di Toko Daging dan Pasar Swalayan	63
3. Penjualan Secara Keliling	63
D. Hasil Penelitian terhadap Praktek Hewan Potong di Kabupaten Sumedang.....	64

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKHIR SEBAGAI KONSUMEN/PENGGUNA HEWAN POTONG DI KABUPATEN SUMEDANG

A. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan Dan Penyediaan Pasar Hewan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....	68
--	----

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan Terhadap Pelaku Usaha Hewan Potong	69
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 29 tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan dalam upaya memfasilitasi Rumah Pemotongan Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan	75
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 29 tahun 2003 dalam upaya memfasilitasi kebutuhan hewan potong	81
B. Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan Dan Penyediaan Pasar Hewan ...	86
1. Hak-hak konsumen atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan ..	86
2. Hak-Hak Konsumen Atas Penyediaan Pasar Hewan	91
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akhir Dalam Mengonsumsi Hewan Potong Di Kabupaten Sumedang	97
1. Urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen akhir dalam mengonsumsi hewan potong	97
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen akhir berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	98
a. Tuntutan kerugian berdasarkan cacat tersembunyi	101

b. Ganti Rugi	102
c. Perbuatan Melawan Hukum	105
3. Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam mengkonsumsi hewan potong	107
4. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen akhir yang diberikan untuk dapat memberikan perlindungan hukum	114
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	124
1. Pemerintah	124
2. Pelakuusaha	125
3. Akademisi	125
4. Masyarakat.....	125
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	xiv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xx

LAMPIRAN

Lampiran I : Wawancara terhadap Masyarakat, Pelaku Usaha, Rumah Potong, Pemerintah.

Lampiran II: Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Dan Penyediaan Pasar Hewan.